



## Sistem Kasta Dalam Agama Hindu Dan Implikasinya Terhadap Mobilitas Sosial Di Indonesia

Ni Kadek Masari<sup>1\*</sup>, Eko Sukerno<sup>2</sup>, Wayan Agus Wijaya<sup>3</sup>, I Wayan Juniardika<sup>4</sup>, Gede Mustika<sup>4</sup>

<sup>1</sup> SD Negeri 2 Kedisan

<sup>2</sup> SMP Negeri 6 Kahayan Hilir

<sup>3</sup> SMK Negeri 1 Maggelewa

<sup>4</sup> SMK Negeri 1 Tembuku

<sup>5</sup> SD Negeri Nusa Agung

<sup>1\*</sup>ni1447@guru.sd.belajar.id, <sup>2</sup>ekosukerno41@guru.smp.belajar.id, <sup>3</sup>wayanwijaya42@guru.smk.belajar.id, <sup>4</sup>

ijuniardika56@guru.smk.belajar.id, <sup>5</sup>gedemustika28@guru.sd.belajar.id

### Abstrak

Sistem kasta dalam agama Hindu membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan interaksi sosial, dengan dampak signifikan pada mobilitas sosial, terutama di Bali sebagai pusat utama penyebaran Hindu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem kasta dan implikasinya terhadap mobilitas sosial di Indonesia, dengan harapan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan sosial dan ekonomi bagi semua individu. Sistem kasta Hindu di Indonesia adalah adaptasi dari sistem kasta India yang mencakup empat warna utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, dengan perubahan lokal seperti ketiadaan kasta kelima. Kasta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan upacara adat, dengan Brahmana dan Ksatria memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan Sudra. Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak seketat di India, ia tetap mempengaruhi mobilitas sosial dengan membatasi akses individu terhadap peluang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian mengenai dampak sistem kasta menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk mobilitas struktural, batasan kasta tetap berperan dalam menentukan akses dan kesempatan.

**Kata Kunci:** Hindu, Mobilitas, Sosial, Kasta

### PENDAHULUAN

Sistem kasta adalah struktur sosial yang diatur berdasarkan pembagian kelas dalam agama Hindu, yang menentukan status sosial seseorang sejak lahir dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, termasuk pekerjaan, pernikahan, dan interaksi sosial. Sistem kasta ini secara tradisional terdiri dari empat warna utama: Brahmana (pendeta dan cendekiawan), Ksatria (prajurit dan penguasa), Waisya (pedagang dan petani), dan Sudra (pekerja dan pelayan) (Joyo, 2020). Di luar empat warna utama ini, terdapat kelompok Dalit atau 'tidak tersentuh' yang seringkali menghadapi diskriminasi paling parah (Nainggolan, 2021). Memahami pengertian dan struktur sistem kasta ini penting untuk menilai bagaimana pengaruhnya dalam masyarakat Hindu, baik di India maupun di Indonesia.

Sejarah dan perkembangan sistem kasta di Indonesia dimulai dengan kedatangan agama Hindu ke nusantara pada abad pertama Masehi. Agama Hindu, bersama dengan sistem kastanya, menyebar ke berbagai kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit, yang kemudian mempengaruhi struktur sosial masyarakat setempat (Natih, 2016). Pada masa kejayaannya, sistem kasta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Bali yang menjadi pusat utama penyebaran dan pelestarian budaya Hindu. Perkembangan ini menciptakan hierarki sosial yang sangat berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Pentingnya memahami implikasi sistem kasta terhadap mobilitas sosial di Indonesia terletak pada bagaimana sistem ini mempengaruhi kesempatan individu untuk meningkatkan status sosial mereka. Sistem kasta yang kaku dapat membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi lainnya, yang pada akhirnya menghambat mobilitas sosial vertikal. Dengan adanya struktur sosial yang membatasi, orang dari kasta rendah seringkali terjebak dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan, sementara mereka yang berasal dari kasta tinggi menikmati lebih banyak privilege dan kesempatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem kasta dalam agama Hindu di Indonesia, dengan fokus khusus pada bagaimana sistem ini beroperasi di Bali, sebagai pusat utama agama Hindu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi sistem kasta terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini akan menambah literatur tentang sistem kasta dan mobilitas sosial, terutama dalam konteks Indonesia. Dengan memperkaya pengetahuan mengenai sistem kasta dan implikasinya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi studi-studi sosial, antropologi, dan sejarah di Indonesia. Pemahaman yang

lebih mendalam tentang sistem kasta juga akan membantu akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan teori dan penelitian lebih lanjut mengenai struktur sosial dan mobilitas di masyarakat Hindu.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan mobilitas sosial di kalangan masyarakat Hindu di Indonesia. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang disebabkan oleh sistem kasta, rekomendasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang program dan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kesuksesan, terlepas dari latar belakang sosial atau kasta mereka.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui analisis yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data numerik, tetapi lebih pada memahami konteks, motif, dan perspektif individu atau kelompok yang terkait dengan sistem kasta Hindu serta bagaimana sistem tersebut mempengaruhi mobilitas sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti literatur akademik, buku sejarah, artikel jurnal, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan sistem kasta dalam agama Hindu dan dampaknya terhadap mobilitas sosial. Setelah data dikumpulkan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang ditemukan dalam data. Tema-tema ini kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara sistem kasta dan mobilitas sosial dalam konteks Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Sistem Kasta

Sistem kasta dalam agama Hindu adalah sebuah tatanan sosial yang sangat terstruktur dan hierarkis yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Sistem ini dikenal dengan istilah Varna, yang terdiri dari empat kategori utama: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra. Brahmana, yang dianggap sebagai kelompok tertinggi, terdiri dari pendeta dan cendekiawan, sedangkan Kshatriya mencakup para pejuang dan penguasa. Vaishya adalah kelompok pedagang dan petani, sementara Shudra, yang berada di tingkat paling bawah dari sistem Varna, meliputi para pekerja dan pelayan. Selain keempat kelompok ini, ada juga Dalit atau "paria," yang dianggap berada di luar sistem Varna dan sering menghadapi diskriminasi sosial yang berat (Joyo, 2020).

Sistem kasta ini tidak hanya berpengaruh dalam struktur sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekonomi dan politik India sepanjang sejarah. Meskipun banyak negara bagian di India modern telah berusaha untuk menghapus diskriminasi berbasis kasta melalui undang-undang dan kebijakan sosial, dampak dari sistem ini masih terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Secara historis, asal-usul sistem kasta dapat ditelusuri kembali ke kitab suci Hindu yang dikenal sebagai Veda, yang ditulis antara 1500-500 SM. Salah satu kitab tertua, Rigveda, menggambarkan sistem Varna dalam himne Purusha Sukta, yang menceritakan tentang penciptaan dunia melalui pengorbanan kosmis manusia primordial, Purusha (Mashad, 2014).

Dalam himne tersebut, setiap varna berasal dari bagian tubuh Purusha: Brahmana dari mulutnya, Kshatriya dari lengannya, Vaishya dari pahanya, dan Shudra dari kakinya (Chandel, 2018). Narasi ini memberikan legitimasi religius pada hierarki dan peran sosial yang ditetapkan dalam sistem kasta, di mana setiap varna dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Meski banyak tantangan telah muncul untuk menentang legitimasi sistem kasta, termasuk dari gerakan sosial dan reformasi agama, warisan dari tatanan ini masih berdampak besar pada dinamika sosial di India saat ini.

Selama berabad-abad, sistem kasta di India mengalami evolusi dan menjadi semakin kaku, terutama pada masa kejayaan Dinasti Gupta (sekitar 320-550 M) yang sering disebut sebagai zaman keemasan budaya Hindu. Pada periode ini, stratifikasi sosial menjadi lebih jelas dan ketat, dengan peraturan-peraturan yang mengatur interaksi antar varna semakin diperketat. Sistem kasta tidak hanya mendefinisikan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seseorang tetapi juga menentukan aspek-aspek lain dari kehidupan, seperti perkawinan, tempat tinggal, dan bahkan dengan siapa seseorang bisa makan dan bergaul. Dengan demikian, sistem ini mengatur hampir setiap aspek kehidupan individu dalam masyarakat Hindu dan memperkuat hierarki sosial yang ada.

Ketika Inggris menjajah India pada abad ke-18 dan ke-19, sistem kasta yang sudah ada ini semakin diperkuat melalui kebijakan-kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial Inggris tidak hanya mendokumentasikan tetapi juga mengklasifikasikan masyarakat India berdasarkan kasta sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem administrasi yang efisien. Langkah ini justru memperdalam perpecahan sosial yang sudah ada. Pencatatan kasta secara resmi dalam sensus, dan penetapan hak serta tanggung jawab khusus bagi kasta-kasta tertentu oleh pemerintah kolonial, membuat stratifikasi sosial berdasarkan kasta semakin mengakar dan sulit diubah (Long, 2020).

Upaya Inggris untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan masyarakat India berdasarkan kasta tidak hanya memperkuat batas-batas sosial tetapi juga meningkatkan diskriminasi yang menyertainya. Meskipun kebijakan-kebijakan ini pada awalnya dirancang untuk tujuan administratif, efek jangka panjangnya adalah memperkuat struktur

kasta yang sudah ada dan memperdalam ketidaksetaraan sosial di India. Hal ini menjadi salah satu warisan paling berpengaruh dari penjajahan Inggris, yang dampaknya masih dirasakan hingga hari ini, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi berbasis kasta sejak India merdeka. Sistem kasta, dengan segala kompleksitas dan sejarahnya, tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di India modern (Long, 2020).

Meskipun Konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950 secara resmi melarang diskriminasi berdasarkan kasta, warisan dari sistem kasta tetap menonjol dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di India. Undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis kasta, termasuk Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Sipil tahun 1955 dan Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Kastam dan Jadwal Tahun 1989, telah diberlakukan untuk memerangi praktik-praktik diskriminatif. Namun, dalam kenyataannya, stigma dan hierarki kasta masih memengaruhi akses seseorang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Di banyak desa dan kota kecil, sistem kasta tetap menjadi faktor yang menentukan dalam hubungan sosial dan ekonomi, meskipun tidak diakui secara resmi. Perbedaan dalam status sosial berdasarkan kasta sering kali tercermin dalam akses terhadap sumber daya seperti air bersih, perumahan, dan perawatan kesehatan, dengan kelompok-kelompok terpinggirkan sering kali mengalami kekurangan akses ini.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan yang diwarisi dari sistem kasta, pemerintah India telah mengadopsi berbagai kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif. Kebijakan-kebijakan ini termasuk sistem reservasi kursi dalam pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, seperti Dalit (sebelumnya dikenal sebagai "untouchables") dan kelompok kasta rendah lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan peluang yang lebih adil dan merata, serta mengangkat kelompok-kelompok ini dari kemiskinan dan marginalisasi. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan tinggi, sejumlah kursi di perguruan tinggi dan universitas disediakan khusus untuk anggota kasta yang terpinggirkan, sementara di sektor pemerintahan, terdapat quota pekerjaan yang dikhususkan untuk kelompok-kelompok ini. Kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan bagi banyak individu dari kelompok-kelompok terpinggirkan, memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Meskipun demikian, perjuangan untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi di India masih jauh dari selesai. Kebijakan affirmative action sering kali menjadi subjek perdebatan sengit, baik dari pihak yang merasa bahwa kebijakan ini sangat penting untuk memperbaiki ketidakadilan sejarah, maupun dari pihak yang menganggap bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakadilan baru bagi kelompok-kelompok lain. Selain itu, di banyak wilayah pedesaan, struktur kasta tradisional masih sangat kuat, membuat upaya pemerintah untuk memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan menjadi sangat sulit. Dalam konteks perkotaan, meskipun diskriminasi kasta mungkin tidak selalu tampak di permukaan, pengaruhnya tetap ada, terutama dalam hal kesempatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, meskipun banyak kemajuan telah dicapai sejak kemerdekaan, India masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan masyarakat yang benar-benar setara dan bebas dari diskriminasi kasta..

#### **Perbedaan Sistem Kasta Di India Dan Indonesia**

Sistem kasta di India adalah sebuah tatanan sosial yang sangat tua dan kompleks, dengan akar yang mendalam dalam sejarah dan budaya Hindu. Sistem ini telah berkembang selama ribuan tahun, menciptakan struktur sosial yang hierarkis dan kaku, yang membagi masyarakat ke dalam empat warna utama: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra. Masing-masing warna ini memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan secara ketat, yang diwariskan secara turun-temurun dan membatasi mobilitas sosial. Di luar sistem warna ini, ada kelompok yang dikenal sebagai Dalit, yang selama berabad-abad mengalami diskriminasi yang parah dan diperlakukan sebagai "tak tersentuh." Dalam banyak kasus, sistem kasta di India menentukan hampir setiap aspek kehidupan individu, termasuk pekerjaan yang bisa mereka lakukan, status sosial yang mereka miliki, dan bahkan pilihan pernikahan mereka. Kaku dan terstruktur, sistem ini menciptakan stratifikasi sosial yang sulit ditembus, menjadikannya salah satu sistem hierarki sosial yang paling kompleks di dunia.

Di sisi lain, Indonesia, meskipun juga memiliki sejarah hierarki sosial, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep kasta. Dalam konteks Indonesia, sistem kasta paling menonjol di Bali, di mana masyarakat Hindu Bali mengadopsi sistem kasta sebagai bagian dari agama Hindu yang datang dari India. Namun, sistem kasta di Bali tidak seketat atau sekompleks di India. Di Bali, kasta juga terbagi ke dalam empat warna utama: Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, tetapi peran dan tanggung jawab mereka tidak sekeras yang ada di India. Meskipun masih ada unsur hierarki sosial, seperti dalam upacara keagamaan dan ritual adat, sistem kasta di Bali lebih bersifat fleksibel. Mobilitas sosial lebih mungkin terjadi, dan diskriminasi berbasis kasta tidak sekeras atau seterstruktur seperti di India. Selain itu, interaksi sosial di Bali cenderung lebih inklusif, meskipun masih ada pengakuan terhadap status kasta.

Perbedaan sejarah dan budaya antara India dan Indonesia telah menghasilkan sistem kasta yang berbeda dalam dampaknya terhadap masyarakat. Di India, sistem kasta telah menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam dan perpecahan yang sulit diatasi, meskipun ada upaya modern untuk menghapus diskriminasi kasta melalui undang-undang dan kebijakan afirmatif. Di Indonesia, terutama di Bali, sistem kasta lebih merupakan warisan budaya yang masih dihormati tetapi tidak lagi menentukan nasib seseorang secara ketat. Meskipun tetap ada beberapa elemen diskriminasi berbasis kasta, dampaknya tidak sekuat di India, dan masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, meskipun kedua negara ini memiliki elemen hierarki sosial yang berakar pada konsep kasta, perbedaan dalam sejarah, struktur, dan dampaknya terhadap masyarakat membuat pengalaman sosial mereka sangat berbeda.

Di Indonesia, konsep kasta dikenal terutama di Bali, di mana sistem ini juga memiliki akar dalam agama Hindu, yang diperkenalkan oleh para pedagang dan pengaruh dari India pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi (Sihombing,

2022). Sistem kasta Bali terdiri dari empat kelompok utama yang disebut Catur Varna: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Meskipun secara struktural mirip dengan sistem kasta di India, penerapan dan dampaknya berbeda. Sistem kasta di Bali lebih fleksibel dan tidak sekeras di India. Misalnya, pernikahan antar kasta di Bali lebih umum dan tidak menyebabkan stigma sosial yang sama seperti di India (Novela, 2023). Selain itu, sistem kasta di Bali lebih terintegrasi dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.

Sistem kasta di India telah mengalami berbagai reformasi dan perubahan, terutama sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1947. Pemerintah India telah memberlakukan undang-undang untuk menghapus diskriminasi kasta dan memberikan hak yang sama kepada semua warganya (Mosse, 2020). Namun, meskipun ada kemajuan signifikan, sisa-sisa diskriminasi kasta masih ada, terutama di daerah pedesaan. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun sistem kasta Bali masih ada, pengaruhnya tidak sekuat di India dan tidak diterapkan di seluruh negeri. Pemerintah Indonesia juga mendorong kesetaraan dan keadilan sosial melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial (Ningsih et al., 2023).

Dalam kedua negara, sistem kasta memiliki dampak yang mendalam terhadap struktur sosial dan interaksi antar individu. Di India, hierarki kasta sering kali mempengaruhi akses seseorang ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, sementara di Bali, kasta lebih terkait dengan peran dalam upacara keagamaan dan tanggung jawab sosial. Namun, baik di India maupun di Bali, ada gerakan-gerakan sosial dan individu-individu yang berusaha untuk melawan diskriminasi kasta dan mempromosikan kesetaraan. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini tabel perbandingan sistem kasta di India dan Indonesia berdasarkan penjelasan sebelumnya:

**Tabel 1.** Perbedaan Sistem Kasta India dan Indonesia

Aspek	Sistem Kasta di India	Sistem Kasta di Indonesia (Bali)
<b>Struktur</b>	Empat warna utama: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Ada juga Dalit (kelompok terpinggirkan)	Empat warna utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra
<b>Sejarah</b>	Berkembang selama ribuan tahun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari	Diperkenalkan melalui pengaruh India pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi
<b>Kekakuan Sistem</b>	Sangat kaku, menentukan pekerjaan, status sosial, dan pilihan pernikahan	Lebih fleksibel, pernikahan antar kasta lebih umum dan tidak menyebabkan stigma sosial yang berat
<b>Penerapan dan Dampak</b>	Mempengaruhi akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik; masih ada diskriminasi terutama di daerah pedesaan	Lebih terkait dengan peran dalam upacara keagamaan dan tanggung jawab sosial; tidak diterapkan di seluruh negeri
<b>Reformasi dan Perubahan</b>	Pemerintah memberlakukan undang-undang untuk menghapus diskriminasi kasta sejak kemerdekaan tahun 1947, tetapi sisa-sisa diskriminasi masih ada	Pemerintah mendorong kesetaraan dan keadilan sosial melalui kebijakan dan program; pengaruh kasta lebih terbatas
<b>Gerakan Sosial</b>	Ada gerakan sosial yang berusaha melawan diskriminasi kasta dan mempromosikan kesetaraan	Gerakan sosial juga ada untuk melawan diskriminasi kasta dan mempromosikan kesetaraan

### Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya dalam suatu sistem stratifikasi sosial. Perpindahan ini dapat berupa naik (upward mobility) atau turun (downward mobility) dalam hierarki sosial yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain (Muary, 2022). Menurut Crul et al. (2017), salah satu pelopor dalam studi mobilitas sosial, mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Sorokin (2019), mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal melibatkan perpindahan naik atau turun dalam hierarki sosial. Misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian menjadi kaya melalui pendidikan dan pekerjaan adalah contoh mobilitas vertikal ke atas. Sebaliknya, seseorang yang mengalami kebangkrutan dan turun ke status ekonomi yang lebih rendah adalah contoh mobilitas vertikal ke bawah.

Mobilitas horizontal mengacu pada perpindahan individu atau kelompok dalam status sosial yang sama atau setara, tanpa perubahan signifikan dalam tingkat sosial mereka. Contohnya adalah seorang guru yang pindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain dengan tingkat yang sama, atau seorang pegawai yang berpindah dari satu departemen ke departemen lain dalam perusahaan yang sama. Mobilitas horizontal lebih terkait dengan perubahan dalam peran atau lokasi kerja tanpa perubahan signifikan dalam status sosial. Mobilitas struktural adalah perubahan dalam status sosial yang diakibatkan oleh perubahan dalam struktur sosial itu sendiri, seperti perubahan ekonomi, politik, atau teknologi. Misalnya, revolusi industri yang menciptakan banyak peluang pekerjaan baru yang memungkinkan banyak orang berpindah dari status petani menjadi pekerja pabrik adalah contoh mobilitas struktural. Mobilitas ini tidak hanya tergantung pada upaya individu tetapi juga pada perubahan besar dalam masyarakat yang menciptakan peluang atau hambatan baru.

Mobilitas sosial, atau pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial.

1. Pendidikan: Pendidikan sering kali dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan peluang karir yang lebih luas. Ini juga berarti gaji yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup dan status sosial. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan manajerial yang dapat membantu dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Ekonomi: Stabilitas ekonomi di suatu negara atau daerah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ketika ekonomi stabil, ada lebih banyak peluang kerja dan peningkatan gaji. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga berarti adanya investasi dalam infrastruktur dan industri, yang membuka lebih banyak peluang kerja. Ini memungkinkan individu untuk naik dalam hierarki sosial melalui peningkatan pendapatan dan aset. Faktor ekonomi juga mencakup akses ke sumber daya seperti modal untuk memulai usaha, kredit, dan layanan finansial lainnya yang dapat mendukung mobilitas sosial.
3. Jaringan Sosial: Jaringan sosial atau koneksi sering kali memberikan akses ke informasi dan peluang yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain. Ini bisa berupa informasi tentang lowongan pekerjaan, beasiswa, atau peluang bisnis. Jaringan sosial yang kuat juga dapat memberikan dukungan emosional dan moral yang penting dalam menghadapi tantangan dan mengejar peluang. Dalam banyak kasus, jaringan sosial juga bisa menyediakan mentor atau sponsor yang dapat membimbing dan membantu seseorang dalam perjalanan karir.

Pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial bekerja secara sinergis untuk mempengaruhi mobilitas sosial. Peningkatan di salah satu area ini dapat berdampak positif pada area lainnya, menciptakan siklus yang mendukung pergerakan sosial yang lebih besar dan peningkatan kesejahteraan individu maupun kelompok dalam masyarakat.

### **Sejarah Masuknya Agama Hindu Di Indonesia**

Masuknya agama Hindu ke Indonesia adalah bagian penting dari sejarah panjang Indonesia yang penuh dengan interaksi budaya dan perdagangan dengan negara-negara lain. Pada abad pertama Masehi, pedagang India mulai tiba di Nusantara, membawa serta agama dan kebudayaan mereka (Fitriani et al., 2023). Bukti arkeologis, seperti prasasti dan artefak, menunjukkan bahwa agama Hindu mulai tersebar di kalangan masyarakat Nusantara sejak saat itu. Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, yang diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi, adalah salah satu bukti tertua keberadaan Hindu di Indonesia. Prasasti ini menunjukkan adanya kerajaan Hindu di Kutai, dengan raja yang memuja dewa-dewa Hindu.

Proses penyebaran Hindu di Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pernikahan dan pertukaran budaya (Sari et al., 2024). Para pedagang dan pemuka agama Hindu dari India berinteraksi dengan penguasa lokal, yang kemudian mengadopsi agama dan budaya Hindu. Raja-raja di kerajaan-kerajaan awal Indonesia, seperti Tarumanagara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah, menerima pengaruh Hindu dan mulai membangun candi-candi sebagai tempat pemujaan. Candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Pada abad ke-7 hingga abad ke-10, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang pesat di Indonesia. Salah satu kerajaan terbesar adalah Sriwijaya, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan keagamaan di Asia Tenggara. Meskipun kerajaan ini lebih dikenal sebagai kerajaan Buddha, pengaruh Hindu masih kuat terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra yang berkembang pada masa itu. Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah juga menjadi salah satu pusat keagamaan dan kebudayaan Hindu yang penting, dengan pembangunan Candi Prambanan yang megah sebagai bukti kejayaannya.

Selanjutnya, kerajaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-15 menjadi puncak kejayaan Hindu di Indonesia. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran budaya Hindu. Dalam kerajaan ini, sistem kasta Hindu diperkenalkan dan diterapkan dalam masyarakat. Kitab-kitab seperti Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca memberikan gambaran tentang kehidupan sosial, politik, dan keagamaan pada masa itu, serta menunjukkan tingginya tingkat perkembangan intelektual di bawah pengaruh Hindu.

Meskipun kemudian Islam mulai masuk dan menyebar di Indonesia pada abad ke-13, pengaruh Hindu tetap bertahan dan menjadi bagian integral dari budaya Indonesia. Banyak adat dan tradisi Hindu yang masih dipertahankan hingga saat ini, terutama di Bali, yang menjadi pusat Hindu di Indonesia. Festival-festival keagamaan, upacara adat, dan seni tari serta musik Bali masih mencerminkan warisan Hindu yang kaya. Sejarah masuknya Hindu ke Indonesia menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan agama dalam membentuk identitas dan tradisi suatu masyarakat.

### **Adaptasi Sistem Kasta Dalam Budaya Indonesia**

Adaptasi sistem kasta adalah hasil dari pengaruh kuat agama Hindu yang masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Sistem kasta di Indonesia, yang dikenal sebagai Catur Warna, adalah adaptasi dari sistem kasta India yang terdiri dari empat kelompok sosial utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, dalam penerapannya di Indonesia, sistem ini mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Salah satu perubahan signifikan adalah ketiadaan kasta kelima, yaitu Paria, yang ada dalam sistem kasta di India. Kasta Brahmana terdiri dari pendeta dan guru agama yang memiliki tugas untuk memimpin upacara keagamaan dan menjaga ajaran-ajaran suci Hindu (Ghose, 2003). Mereka dihormati sebagai pemimpin spiritual dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Bali. Kasta Ksatria mencakup para raja, bangsawan, dan prajurit yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan. Mereka memainkan peran penting dalam struktur politik dan militer di kerajaan-kerajaan Bali. Kasta Waisya terdiri dari para pedagang, petani, dan pengrajin yang merupakan tulang punggung ekonomi

masyarakat. Kasta Sudra, yang merupakan kasta terbawah, terdiri dari mayoritas rakyat jelata yang bekerja sebagai buruh dan pelayan .

Adaptasi sistem kasta ini juga tercermin dalam adat istiadat dan upacara adat di Bali. Misalnya, dalam upacara perkawinan, kasta mempengaruhi proses dan tata cara pelaksanaan upacara. Perkawinan antar kasta yang berbeda masih diatur dengan ketat, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa kelonggaran. Sistem kasta juga berperan dalam upacara kremasi (Ngaben), di mana ritual dan prosesi yang dilakukan berbeda-beda tergantung pada kasta almarhum (Maulana et al., 2022). Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak seketat di India, pengaruhnya tetap terasa kuat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan . Di luar Bali, pengaruh sistem kasta dalam budaya Indonesia tidak sekuat di Bali, tetapi tetap ada dalam beberapa aspek. Di Jawa, misalnya, pengaruh Hindu-Buddha masih terlihat dalam struktur sosial dan sistem kerajaan yang ada. Meskipun sistem kasta tidak diadopsi secara formal, hierarki sosial yang mirip dengan konsep kasta masih bisa ditemukan. Para bangsawan dan elite masyarakat seringkali memiliki status yang mirip dengan kasta Ksatria, sementara para pemuka agama yang terlibat dalam ritual Hindu-Buddha memiliki status yang mirip dengan kasta Brahmana (Picard, 2020). Secara keseluruhan, adaptasi sistem kasta dalam budaya Indonesia menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan pengaruh asing ke dalam konteks lokal mereka. Sistem kasta yang diadaptasi di Indonesia lebih fleksibel dan tidak seketat sistem aslinya di India, memungkinkan terciptanya harmoni dan keselarasan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Meskipun pengaruhnya mungkin berbeda-beda di setiap daerah, sistem kasta tetap menjadi bagian integral dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam .

### **Dampak sistem kasta agama hindu di Indonesia terhadap mobilitas sosial**

Sistem kasta Hindu yang diadopsi di Indonesia, khususnya di Bali, memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas sosial masyarakat. Sistem kasta ini, yang terdiri dari empat warna: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, telah menciptakan stratifikasi sosial yang mempengaruhi peluang individu untuk berpindah dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak seketat seperti di India, struktur hierarkis ini tetap memiliki pengaruh dalam mengatur akses terhadap sumber daya dan peluang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam konteks di Indonesia, mobilitas vertikal – yaitu perpindahan naik atau turun dalam hierarki sosial – sering kali terhambat oleh sistem kasta. Misalnya, kasta Brahmana yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki sosial memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan tinggi dan peran kepemimpinan dalam masyarakat, sementara kasta Sudra, yang berada di posisi terbawah, memiliki akses yang lebih terbatas. Ini mengakibatkan mobilitas vertikal ke atas menjadi sulit bagi individu dari kasta Sudra, meskipun ada beberapa kasus di mana individu berhasil naik status melalui pendidikan atau prestasi pribadi . Mobilitas horizontal, yang melibatkan perpindahan dalam status sosial yang sama atau setara, juga dipengaruhi oleh sistem kasta. Misalnya, seorang individu dari kasta Waisya yang pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam sektor perdagangan mungkin tidak mengalami perubahan signifikan dalam status sosial mereka. Namun, perpindahan tersebut tetap dibatasi oleh norma-norma sosial yang mengatur peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kasta mereka. Meskipun mobilitas horizontal lebih fleksibel dibandingkan mobilitas vertikal, sistem kasta tetap memainkan peran dalam membatasi jenis pekerjaan dan peran sosial yang dapat diakses oleh individu berdasarkan kastanya . Mobilitas struktural, yang terjadi akibat perubahan besar dalam struktur sosial, juga dipengaruhi oleh sistem kasta. Perubahan ekonomi, seperti peningkatan industri pariwisata di Bali, telah menciptakan peluang baru bagi mobilitas sosial. Namun, individu dari kasta tertentu mungkin lebih mudah memanfaatkan peluang ini dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, anggota kasta Brahmana dan Ksatria mungkin lebih mudah mendapatkan posisi manajerial atau kepemimpinan dalam industri pariwisata, sementara anggota kasta Sudra mungkin lebih sering mengisi posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Dengan demikian, meskipun ada peluang untuk mobilitas struktural, akses terhadap peluang ini tetap dipengaruhi oleh posisi kasta seseorang .

Pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial adalah faktor penting yang mempengaruhi mobilitas sosial. Dalam konteks sistem kasta di Bali, akses terhadap pendidikan sering kali ditentukan oleh kasta. Anggota kasta yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan tinggi, yang pada gilirannya membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan mobilitas sosial ke atas. Stabilitas ekonomi dan peluang ekonomi juga cenderung lebih mudah diakses oleh anggota kasta yang lebih tinggi, yang memiliki lebih banyak modal dan jaringan sosial yang kuat. Jaringan sosial, yang sangat penting dalam mobilitas sosial, juga sering kali terbatas oleh batasan kasta, dengan anggota kasta yang sama cenderung berinteraksi dan mendukung satu sama lain .

Dengan demikian, sistem kasta Hindu di Indonesia telah menciptakan struktur sosial yang membatasi mobilitas sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Meskipun ada beberapa peluang untuk mobilitas struktural yang dihasilkan dari perubahan ekonomi dan sosial, akses terhadap peluang ini tetap dipengaruhi oleh kasta. Pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi mobilitas sosial dalam konteks sistem kasta, menciptakan batasan-batasan yang kompleks dan sering kali sulit diatasi oleh individu dari kasta yang lebih rendah .

Adapun beberapa penelitian mengenai dampak sistem kasta Hindu terhadap mobilitas sosial telah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi peluang individu di masyarakat. Salah satu penelitian penting adalah studi Clifford Geertz yang berjudul "The Religion of Java". Dalam penelitian ini, Geertz (1976) mengeksplorasi bagaimana sistem kasta di Jawa, meskipun tidak seketat di Bali, tetap mempengaruhi struktur sosial dan mobilitas sosial masyarakat. Geertz menemukan bahwa meskipun ada pergerakan sosial di kalangan masyarakat Jawa, kasta dan status sosial tetap memainkan peran penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kasta, meskipun secara formal mungkin tidak diakui, tetap berfungsi sebagai mekanisme pengatur dalam masyarakat Jawa.

Penelitian lain yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Henk Schulte Nordholt (2010) dalam bukunya "The Spell of Power: A History of Balinese Politics". Schulte Nordholt menganalisis bagaimana sistem kasta di Bali telah mempengaruhi struktur politik dan sosial di pulau tersebut. Ia menemukan bahwa kasta Brahmana dan Ksatria memiliki akses yang lebih baik terhadap posisi-posisi kepemimpinan dan kekuasaan, sementara kasta Sudra seringkali terpinggirkan dalam hal kesempatan politik dan ekonomi. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem kasta tidak hanya membatasi mobilitas sosial secara vertikal tetapi juga mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Schulte Nordholt juga mencatat bahwa meskipun ada perubahan ekonomi dan politik di Bali, struktur kasta tetap mempertahankan pengaruhnya dalam menentukan akses dan peluang sosial.

Studi Hobart (2017) dalam "Bali is a battlefield Or the triumph of the imaginary over actuality" juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak sistem kasta terhadap mobilitas sosial. Hobart mengeksplorasi bagaimana adat istiadat dan ritual keagamaan di Bali memperkuat sistem kasta dan membatasi mobilitas sosial. Ia menemukan bahwa upacara keagamaan dan adat yang terkait dengan kasta memainkan peran penting dalam mempertahankan hierarki sosial. Misalnya, upacara perkawinan dan kremasi diatur berdasarkan kasta, yang memperkuat batas-batas sosial dan membatasi pergerakan individu antara kasta. Hobart juga menyoroti bahwa meskipun ada beberapa peluang untuk mobilitas sosial melalui pendidikan dan ekonomi, adat istiadat dan ritual tetap menjadi penghalang yang signifikan bagi mobilitas sosial di Bali.

## KESIMPULAN

Penelitian tentang sistem kasta dalam agama Hindu dan implikasinya terhadap mobilitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta di Indonesia, lebih fleksibel dibandingkan dengan India, ia masih mempengaruhi struktur sosial dan mobilitas sosial masyarakat. Sistem kasta, yang dikenal sebagai Catur Varna, mengatur peran sosial dan tanggung jawab berdasarkan kasta, mulai dari Brahmana hingga Sudra. Meskipun tidak seketat di India, di mana sistem kasta sangat kaku dan menentukan pekerjaan serta status sosial, sistem kasta yang masih mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial dalam upacara adat. Ini menyebabkan terbatasnya mobilitas vertikal, terutama bagi kasta Sudra yang berada di posisi terbawah, meskipun ada beberapa individu yang berhasil meningkatkan status mereka melalui pendidikan atau prestasi pribadi.

Implikasi dari adanya sistem kasta ini adalah bahwa mobilitas sosial di Indonesia, sering kali terbatas oleh struktur hierarkis yang ditentukan oleh kasta. Akses terhadap pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan yang lebih baik sering kali lebih mudah diakses oleh kasta yang lebih tinggi, sementara kasta yang lebih rendah memiliki keterbatasan dalam hal ini. Faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial bekerja bersama-sama untuk mempengaruhi mobilitas sosial, menciptakan batasan yang sulit diatasi oleh individu dari kasta rendah. Meskipun ada upaya reformasi dan perubahan sosial, serta peluang mobilitas struktural yang dihasilkan dari perubahan ekonomi, sistem kasta tetap memainkan peran penting dalam menentukan peluang individu di masyarakat, menunjukkan bahwa stratifikasi sosial yang didasarkan pada kasta masih relevan dalam konteks modern Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandel, N. (2018). Varna: A Historical Review. *International Journal of Multidisciplinary*, 3(06), 357-362.
- Crul, M., Schneider, J., Keskiner, E., & Lelie, F. (2017). The multiplier effect: How the accumulation of cultural and social capital explains steep upward social mobility of children of low-educated immigrants. *Ethnic and Racial Studies*, 40(2), 321-338.
- Fitriani, A., Dari, R. W., Siregar, I., & Purnomo, B. (2023). Jejak Historis Dan Peran Indonesia Dalam Jalur Rempah Sebagai Warisan Budaya Bahari. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 2(2), 9-18.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Ghose, S. (2003). The dalit in India. *Social Research: An International Quarterly*, 70(1), 83-109.
- Hobart, M. (2017). Bali is a battlefield Or the triumph of the imaginary over actuality. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), 187-212.
- Joyo, P. R. (2020). *Nilai-nilai pendidikan hindu dalam ślokāntara*. Jakad Media Publishing.
- Long, J. D. (2020). *Historical dictionary of Hinduism*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Mashad, D. (2014). *Muslim Bali: mencari kembali harmoni yang hilang*. Pustaka Al Kautsar.
- Maulana, A. M. R., Untung, S. H., & Rosyidah, H. A. (2022). Religious Values in Balinese Hinduism Death Rituals: An Anthropological Perspective. *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 8(1), 58-73.
- Mosse, D. (2020). Outside caste? The enclosure of caste and claims to castelessness in India and the United Kingdom. *Comparative Studies in Society and History*, 62(1), 4-34.
- Muary, R. (2022). *Sosiologi: Pengantar, Teori dan Paradigma*. Merdeka Kreasi Group.

- Nainggolan, D. M. (2021). Diakonia Lintas Agama dan Lintas Gender: Suatu Pengantar Teologi Kristiani dalam Praktik Diakonia Lintas Agama dan Lintas Gender. *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 11(1), 28-40.
- Natih, I., Nyanadeva, K., & Nyoman Metta, N. N. (2016). *Agama Hindu: Sejarah, Sumber, dan Ruang Lingkup*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Nordholt, H. S. (2010). *The spell of power: A history of Balinese politics, 1650-1940* (Vol. 170). Brill.
- Novela, D. A. (2023). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di India: Studi Kasus Mayawati Kunari Dan Perjuangannya Melawan Diskriminasi Politik Terhadap Perempuan Dalit. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 818-831.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sari, I. P., Putri, S. A., Ananda, R. D., Andira, B. I., Manalu, A. I. A., & Zalukhu, D. (2024). Pengaruh Perdagangan Maritim terhadap Penyebaran Islam di Indonesia pada Abad ke-15 M hingga ke-17 M. *Polyscopia*, 1(3), 74-79.
- Sihombing, L. H. (2022). The Significance of the Caste System of Balinese in the Modern Era: A Discourse of Cultural Communication. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(2), 146-156.
- Sorokin, P. A. (2019). Social and cultural mobility. In *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*, Second Edition (pp. 303-308). Routledge.